

Feodal

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



Setiap corak masyarakat punya sisi gelap dan terang masing-masing. Feodalisme merupakan salah satu dari beberapa corak tata-sosial dalam sejarah dunia. Kini "feodal" tak lebih dari sebuah ejekan. Padahal yang biasa dianggap berwatak feodal itu lumrah. Sangat lazim di banyak masyarakat di segala zaman, dengan latar belakang berbeda agama, etnisitas, jender, profesi, ataupun kelas sosial. Termasuk mereka yang berniat atau bergaya anti-feodal.

Bulan September lalu sebagian sobat saya berdebat. Ada yang menuduh pihak lain berwatak feodal. Tuduhan itu dibantah keras oleh tertuduh dan pendukung mereka. Berbagai teori ilmu sosial diajukan dalam debat. Yang mengecewakan saya, debat itu dibawa ke dikotomi modern versus tradisi. Atau relativisme versus universalisme.

Sekeras apa pun debat mereka, kedua kubu bersepakat dalam satu hal. Mereka sama-sama menganggap watak feodal itu tercela dan kuno. Kenyataan yang saya amati berbeda. Di mana-mana feodalisme dicaci sekaligus dirindukan.

Kini kesetaraan menjadi slogan di mana-mana. Maka, hubungan sosial yang timpang (apalagi yang turut-turut) dijuluki feodal. Di masa demokrasi dikaramkan sebagai kunci peradaban, kekuasaan elite tanpa dibatasi hukum dianggap meniru penguasa feodal masa lalu. Yakni kaum ningrat bergelar serba muluk, gila hormat, anti-kritik dan suka pamer gaya hidup mewah.

Padahal feodalisme tidak hanya kisah hitam gelap atau hanya putih gemerlap. Begitu juga masyarakat non-feodal. Wajar jika warisan mereka penuh kontradiksi.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Feodal

(Sambungan dari halaman 1)

Dalam tata-sosial feodal, bangsawan bertanggung jawab secara moral (bukan legal) atas kesejahteraan para abdi mereka. Tidak semua bangsawan menjalankan kewajiban tersebut. Tapi, kira-kira begitulah norma ideal yang diharapkan dari bangsawan atau "ratu adil" di zumannya.

Gaya hidup mewah kaum bangsawan berlebihan. Malah banyak yang dekaden. Tapi, mereka juga mewariskan karya seni dan budaya sangat hebat.

Kini, kita hidup dalam masyarakat kapitalis. Ideologi kapitalisme memuliakan pasar bebas, dan mendidik orang bekerja keras dan berhemat. Kita terbina mence-mooh feodalisme sebagai barang kuno, nista, dan terkutuk. Tapi, berbagai cemooh dan paham itu tidak cocok dengan praktik. Di negeri kapitalis, kaum hartawan doyan pamer gaya hidup mewah seperti bangsawan feodal. Adanya segelintir konglomerat kapitalis yang bergaya hidup sederhana itu sebuah kelainan.

Bulan Agustus lalu, Indonesia diguncang protes terbesar sejak Reformasi 1998. Pemicunya tidak satu. Salah satu pemicunya adalah gaya hidup mewah ala bangsawan yang dipamerkan sejumlah pejabat tinggi negara. Pemicu lain, keputusan negara memberikan berbagai dana tunjangan berkelimpahan pada anggota parlemen itu. Jumlahnya gila-gilaan bukan saja untuk ukuran ekonomi nasional, tapi dibandingkan dengan tunjangan parlemen di berbagai negara lain.

Politikus pamer hidup mewah bukan barang baru dalam sejarah RI. Di masa Orde Baru, ada program negara bernama "Pola Hidup Sederhana". Bangkitnya Orde Baru sendiri berkait gejala yang sama. Awalnya Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh beberapa jenderal. Pelakunya perwira menengah militer yang muak pada gaya hidup mewah para jenderal. Begitulah salah satu butir pernyataan Letkol Untung, pimpinan G30S, yang disiarkan RRI pagi hari 1 Oktober 1965.

Politik dinasti subur tidak hanya dalam keraton masa lalu, tapi juga dalam republik pada abad ini. Seperti raja, beberapa presiden RI bernaafsru berkuasa tanpa batas masa jabatan, walau baru dua yang berhasil. Sejak RI merdeka, rakyat yang dituduh menghina penguasa negara bisa dihukum pidana. Hukum itu warisan hukum kolonial yang melarang rakyat menghina Ratu Belanda.

Indonesia tidak unik dalam soal ini. Banyak negara miskin di Afrika yang pejabatnya bernaafsru hidup mewah ala bangsawan Eropa. Amerika Serikat, pusat kapitalisme dunia, kini punya presiden dengan ambisi menjadi raja feodal paling vulgar. Pantaslah protes terbesar anti-Trump bulan lalu bertema "No King". Setelah menabrak konstitusi, mengobrak-abrik norma demokrasi, Trump berharap diberi anugerah Nobel Perdamaian dan berminat maju ke pemilu mendatang, mengabaikan batas dua kali masa jabatan presiden.

Kapitalisme hanya bisa berjalan berkat kerja kaum buruh. Tetapi, di negeri ini serikat buruh sulit bertumbuh kuat dan mandiri. Jangankan berharap partai buruh menjadi pemenang utama dalam pemilu.

Universitas semakin beroperasi mirip perusahaan dengan logika kapitalis. Tetapi, mayoritas dosen menolak dianggap buruh yang digaji dan berhak mogok kerja. Mereka cenderung membayangkan profesi mereka seperti pujangga yang dipelihara keraton. Universitas juga memperlakukan dosen bukan sebagai tenaga kerja yang merdeka menjual jasa di pasar kapitalisme. Dosen dituntut mengabdi seumur hidup di satu lembaga. Sementara jurnalis bisa berpindah tempat kerja dalam profesi yang sama tanpa Surat Lulus Butuh dari tempat kerja terdahulu.

Selera feodal bukan monopoli politikus atau akademikus. Kelas menengah kerasan masuk-keluar mal. Di situ mereka sejenak berfantasi dengan selera bangsawan. Dalam ruangan megah dan mewah, sebagai konsumen kapitalisme, mereka menuntut dilayani bagaikan raja dan ratu.

Nikmatnya hidup sebagai kelas menengah di Tanah Air adalah punya pembantu rumah tangga (PRT). Hubungan PRT dan majikan biasanya tidak semata-mata bersifat transaksi komersial. Ada semacam aturan tidak tertulis, secara moral majikan bertanggung jawab atas kesejahteraan PRT. Tak ada hukum yang khusus melindungi hak-hak PRT sebagai buruh. Hubungan kerja itu mirip satu unit hubungan feodal berskala mini.